

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan *Gross National Product* (GNP) perkapita atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang (Sirojuzilam, dalam Yusmawita, 2011:1). Namun tidak dapat disangkal bahwa pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator yang lazim digunakan oleh badan-badan dunia dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara (Todaro, dalam Yusmawita, 2011:1). Menurut Meier, pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Gammel, dalam Yusmawita, 2011:1).

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat ketimpangan antar daerah.

Pembangunan nasional di negara-negara yang sedang berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Pada akhirnya tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah

untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mencapai stabilitas perekonomian daerah, dan untuk membangun basis kesempatan yang beraneka ragam (Jamli, dalam Azulaidin 2003:1).

Peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang berbeda dari masalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) terjadi apabila tiap orang menerima pendapatan yang sama besarnya. Angka pendapatan perkapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan proses pembangunan Indonesia adalah faktor perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regional. Dalam *Trilogi Pembangunan* yang dijadikan pedoman dan arah pembangunan nasional selain pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, pemerataan menjadi salah satu bagian yang penting. Tanpa adanya pemerataan ekonomi, pertumbuhan nasional yang tinggi sekalipun bisa mempengaruhi stabilitas nasional (Majidi, dalam Azulaidin 2003:4).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu indikatornya adalah PDB (*Produk Domestik Bruto*) perkapita untuk tingkat nasional dan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) perkapita untuk tingkat daerah. Melalui perhitungan PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Dimana tinggi rendahnya tingkat

kemakmuran di suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan perkapita.

Dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, dapat dilihat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bahkan dapat dilihat sektor ekonomi yang paling besar memberikan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi selanjutnya.

Suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Arsyad, dalam Azulaidin 2003:7).

Perbedaan akselerasi pertumbuhan antar daerah diantaranya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teratasnya dana, sulitnya menarik investasi, dan kemudian kompetitif dalam menembus pasar serta akseibilitas antar wilayah. Konsentrasi pembangunan dengan mengejai pertumbuhan selama 30 tahun dengan harapan terjadi "trickle down effect" sebagai strategi mencapai pemerataan ternyata jauh dari harapan, bahkan menimbulkan masalah baru berupa ketimpangan baik antar individu, golongan, sektor, maupun wilayah.

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar

kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan perkapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, dalam Yusmawita 2011:2). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Ketimpangan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek *return* atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat resiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap.

Di sisi lain gelombang pencari kerja juga mengalir mengejar kesempatan ke kota-kota besar, ke daerah-daerah yang kaya potensi. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota-kota besar. Oleh karena di kota-kota besar tersebut relatif banyak golongan ekonomi lemah dan penduduk asli ataupun dari daerah-daerah lain dapat mengakibatkan saling berebut tempat dan peluang antar kelompok daerah asal (Munir, dalam Yusmawita 2011:4).

Untuk itulah diperlukan pembangunan daerah yang merupakan bagian

dari pembangunan nasional. Guna meningkatkan pembangunan nasional harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan Pembangunan Nasional.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah). Pembangunan daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan (Zuhri, dalam Yusnawita 2011:5).

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat provinsi maupun

di tingkat daerah kabupaten/kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Disparitas ekonomi dan sosial di Provinsi Sumatera Utara juga berdampak terhadap mobilitas sosial yang kurang menguntungkan dengan adanya para migran. Arus migrasi bergerak dari daerah yang tingkat perekonomiannya lebih rendah menuju ke daerah yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Masalah yang ditimbulkan oleh arus migrasi ini adalah peraukuman kumuh, kejahatan, penyediaan lapangan kerja yang kurang memadai, lingkungan, dan lainnya. Masalah tersebut tentu tidak mudah diselesaikan dan dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu berbagai upaya untuk mengatasi disparitas ekonomi antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sudah saatnya dilakukan dengan intensif.

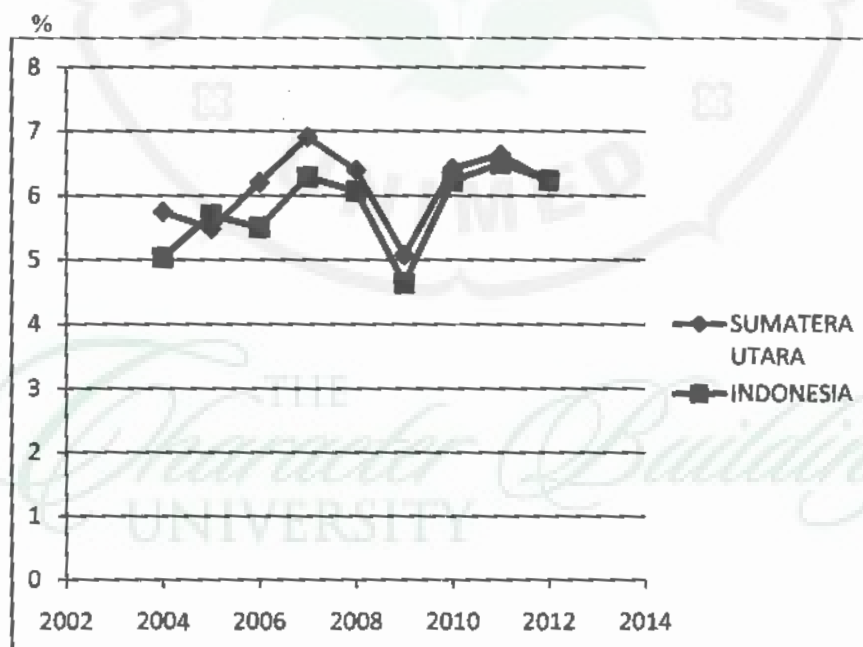
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan Indonesia sejak tahun 2004 – 2012 seperti tabel 1.1 di bawah ini.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2004 – 2012. Sampai tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan positif. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 6,39% menjadi 5,07%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 juga mengalami penurunan dari 6,06% menjadi 4,63%.

Tabel 1.1. Perbandingan PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB Indonesia Tahun 2004 – 2012

NO	TAHUN	SUMATERA UTARA	INDONESIA
		PERTUMBUHAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
1	2004	5,74	5,03
2	2005	5,48	5,69
3	2006	6,20	5,50
4	2007	6,90	6,28
5	2008	6,39	6,06
6	2009	5,07	4,63
7	2010	6,42	6,22
8	2011	6,63	6,49
9	2012	6,22	6,23

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2012 (data diolah)



Gambar 1.1. Perbandingan PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB Indonesia Tahun 2004 – 2012

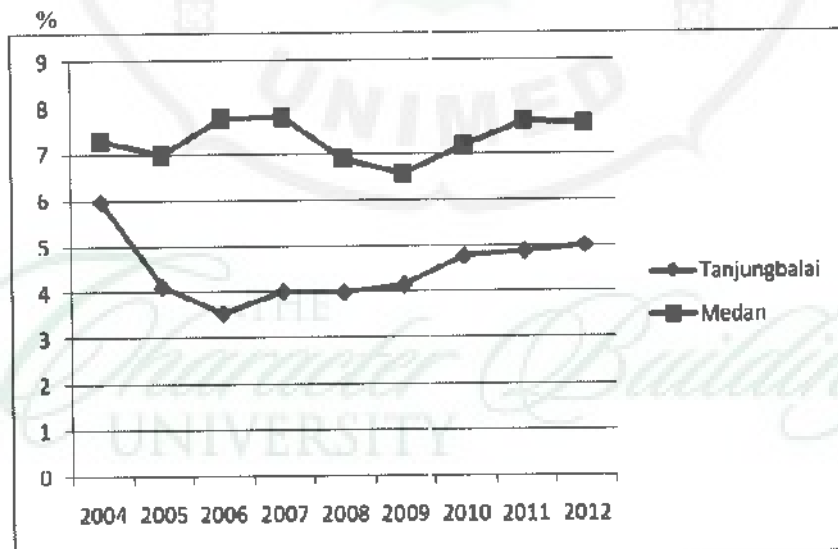
Sumber daya alam yang dimiliki seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan andalan bagi Sumatera Utara. Sumatera Utara dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan wilayah paling barat Indonesia. Pada tahun 2004

Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,74% dan nasional tumbuh sebesar 5,13%. Sedangkan pada tahun 2012 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 6,22% dan nasional tumbuh sebesar 6,23%. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.

Tabel 1.2. Perbandingan PDRB Kota Medan dengan Kota Tanjung Balai Tahun 2004 – 2012

NO	KOTA	TAHUN									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tanjungbalai	5,95	4,11	3,54	4,01	3,99	4,14	4,76	4,86	4,99	
2	Medan	7,29	6,98	7,76	7,78	6,89	6,56	7,16	7,69	7,63	
	Sumatera Utara	5,74	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2012 (data diolah)



Gambar 1.2. Perbandingan PDRB Kota Medan dengan Kota Tanjung Balai Tahun 2004 – 2012

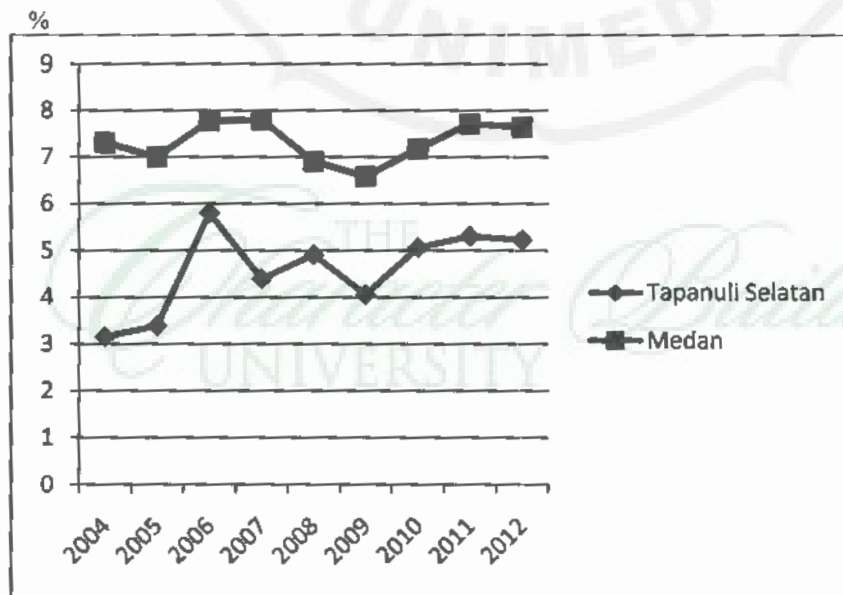
Pertumbuhan ekonomi Kota Medan menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Balai selama periode

pertumbuhan yang fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut Kota Medan mengalami penurunan terendah pada tahun 2009 menjadi sebesar 6,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Balai selama periode tersebut juga mengalami penurunan terendah pada tahun 2006 menjadi sebesar 3,54%. PDRB Kota Medan dengan Kota Tanjung Balai mengalami ketimpangan sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar di atas.

Tabel 1.3. Perbandingan PDRB Kota Medan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2004 – 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tapanuli Selatan	3,15	3,38	5,79	4,39	4,90	4,05	5,06	5,30	5,22
2	Medan	7,29	6,98	7,76	7,78	6,89	6,56	7,16	7,69	7,63
	Sumatera Utara	5,74	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,6	6,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2012 (data diolah)



Gambar 1.3. Perbandingan PDRB Kota Medan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2004 – 2012

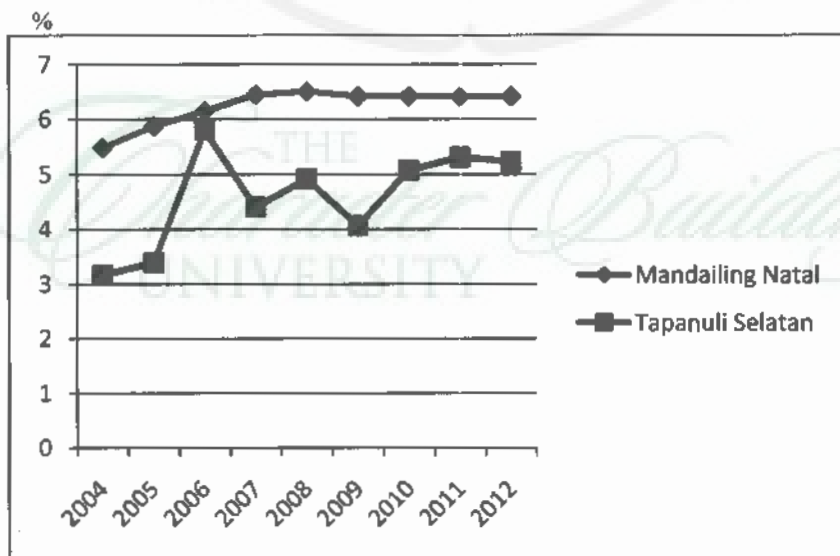
Pertumbuhan ekonomi Kota Medan menunjukkan peningkatan lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2004 – 2012. Sampai tahun 2012 Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut Kota Medan mengalami penurunan terendah pada tahun 2009 menjadi sebesar 6,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode tersebut juga pertumbuhan terendah pada tahun 2004 sebesar 3,15%. PDRB Kota Medan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami ketimpangan sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar di atas.

Tabel 1.4. Perbandingan PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2004 – 2012

NO	KABUPATEN	TAHUN								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mandailing Natal	5,47	5,86	6,14	6,44	6,50	6,41	6,41	6,40	6,41
2	Tapanuli Selatan	3,15	3,38	5,79	4,39	4,90	4,05	5,06	5,30	5,22
	Sumatera Utara	5,74	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2012 (data diolah)



Gambar 1.4. Perbandingan PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2004 – 2012

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2004 – 2012. Sampai tahun 2012 Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut Kabupaten Mandailing Natal mempunyai PDRB terendah pada tahun 2004 sebesar 5,47%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode tersebut juga pertumbuhan terendah pada tahun 2004 sebesar 3,15%. PDRB Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami ketimpangan sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar di atas.

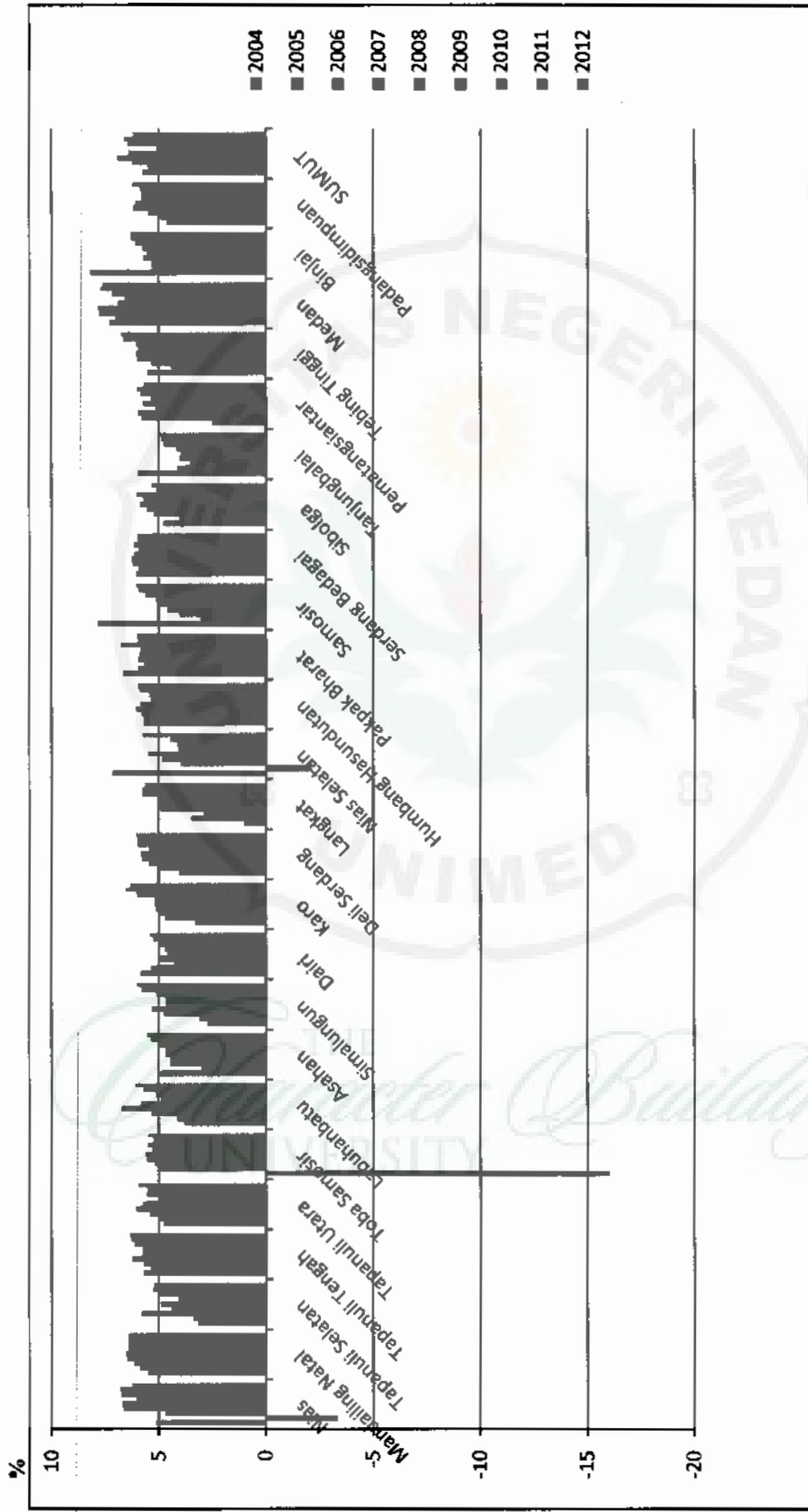
Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 – 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sangat bervariasi seperti pada tabel 1.5 di bawah ini:

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan antar kabupaten/kota bervariasi, ini karena ditunjang oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang ada. Pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5,74%, tahun 2005 sebanyak 5,48%, tahun 2006 sebanyak 6,20%, tahun 2007 sebanyak 6,90%, tahun 2008 sebanyak 6,39%, tahun 2009 sebanyak 5,07%, tahun 2010 sebanyak 6,42%, tahun 2011 sebanyak 6,63%, dan tahun 2012 sebanyak 6,22%, menunjukkan variasi pertumbuhan PDRB (data BPS).

Tabel 1.5. Pertumbuhan PDRB Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004 sampai dengan 2012

NO	KABUPATEN/KOTA (1)	TAHUN								
		2004 (2)	2005 (3)	2006 (4)	2007 (5)	2008 (6)	2009 (7)	2010 (8)	2011 (9)	2012 (10)
01	Nias	5,13	-3,33	4,70	6,64	6,70	6,04	6,75	6,81	6,24
02	Mandailing Natal	5,47	5,86	6,14	6,44	6,50	6,41	6,41	6,40	6,41
03	Tapanuli Selatan	3,15	3,38	5,79	4,39	4,90	4,05	5,06	5,30	5,22
04	Tapanuli Tengah	5,70	5,36	5,68	6,23	5,76	5,70	6,13	6,28	6,35
05	Tapanuli Utara	4,74	5,04	5,44	6,03	5,74	4,98	5,56	5,54	5,95
06	Toba Samosir	-16,04	4,95	5,17	5,53	5,60	5,26	5,50	5,26	5,52
07	Labuhanbatu	3,80	4,14	5,33	6,71	5,84	4,88	5,15	5,72	6,11
08	Asahan	4,94	3,00	4,44	4,45	4,69	4,67	4,97	5,37	5,57
09	Simalungun	2,72	3,11	-4,76	5,31	4,64	4,67	5,12	5,81	6,06
10	Dairi	5,83	5,34	4,28	5,03	4,59	4,72	5,02	5,28	5,44
11	Karo	3,31	4,70	4,96	5,13	5,21	5,17	6,03	6,59	6,34
12	Deli Serdang	4,03	4,97	5,45	5,74	5,82	5,42	5,98	6,01	6,36
13	Langkat	1,01	3,47	2,88	4,91	5,08	5,02	5,74	5,78	5,66
14	Nias Selatan	7,16	-3,12	3,99	4,83	5,50	4,08	4,12	4,46	5,78
15	Humbang Hasundutan	5,71	5,65	5,77	6,06	5,84	5,32	5,45	5,94	5,99
16	Pakpak Bharat	6,66	5,92	5,66	5,95	5,87	5,83	6,77	5,98	6,02
17	Samosir	7,85	3,03	4,02	4,59	5,00	5,10	5,59	5,96	6,07
18	Serdang Bedagai	6,05	5,91	6,22	6,25	6,12	5,92	6,14	5,98	6,00
19	Sibolga	4,76	4,01	5,22	5,53	5,85	5,70	6,04	5,09	5,34
20	Tanjungbalai	5,95	4,11	3,54	4,01	3,99	4,14	4,76	4,86	4,99
21	Pematangsiantar	2,50	5,77	5,96	5,12	5,72	5,36	5,85	6,02	5,71
22	Tebing Tinggi	5,53	4,39	5,33	5,98	6,04	5,95	6,04	6,67	6,75
23	Medan	7,29	6,98	7,76	7,78	6,89	6,56	7,16	7,69	7,63
24	Binjai	8,17	5,28	5,32	5,68	5,54	5,75	6,07	6,28	6,34
25	Padangsidempuan	4,63	4,91	5,49	6,18	6,09	5,78	5,81	5,88	6,23
	Sumatera Utara	5,74	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2012 (data diolah)



Gambar 1.5 Pertumbuhan PDRB Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode Tahun 2004 sampai dengan 2012

Pada tahun 2012 pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tertinggi adalah Kota Medan sebanyak 7,63% diikuti oleh Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Mandailing Natal masing-masing sebesar 6,75% dan 6,41% di atas pertumbuhan PDRB Sumatera Utara sebesar 6,22%. Sementara pertumbuhan PDRB kabupaten/kota pada tahun 2012 terendah masing-masing adalah Kota Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga yang secara berturut-turut sebesar 4,99%, 5,22% dan 5,34% di bawah pertumbuhan PDRB Sumatera Utara sebesar 6,22%.

Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 - 2012 menunjukkan bahwa PDRB perkapita kabupaten/kota sangat bervariasi seperti pada tabel 1.6 di bawah ini:

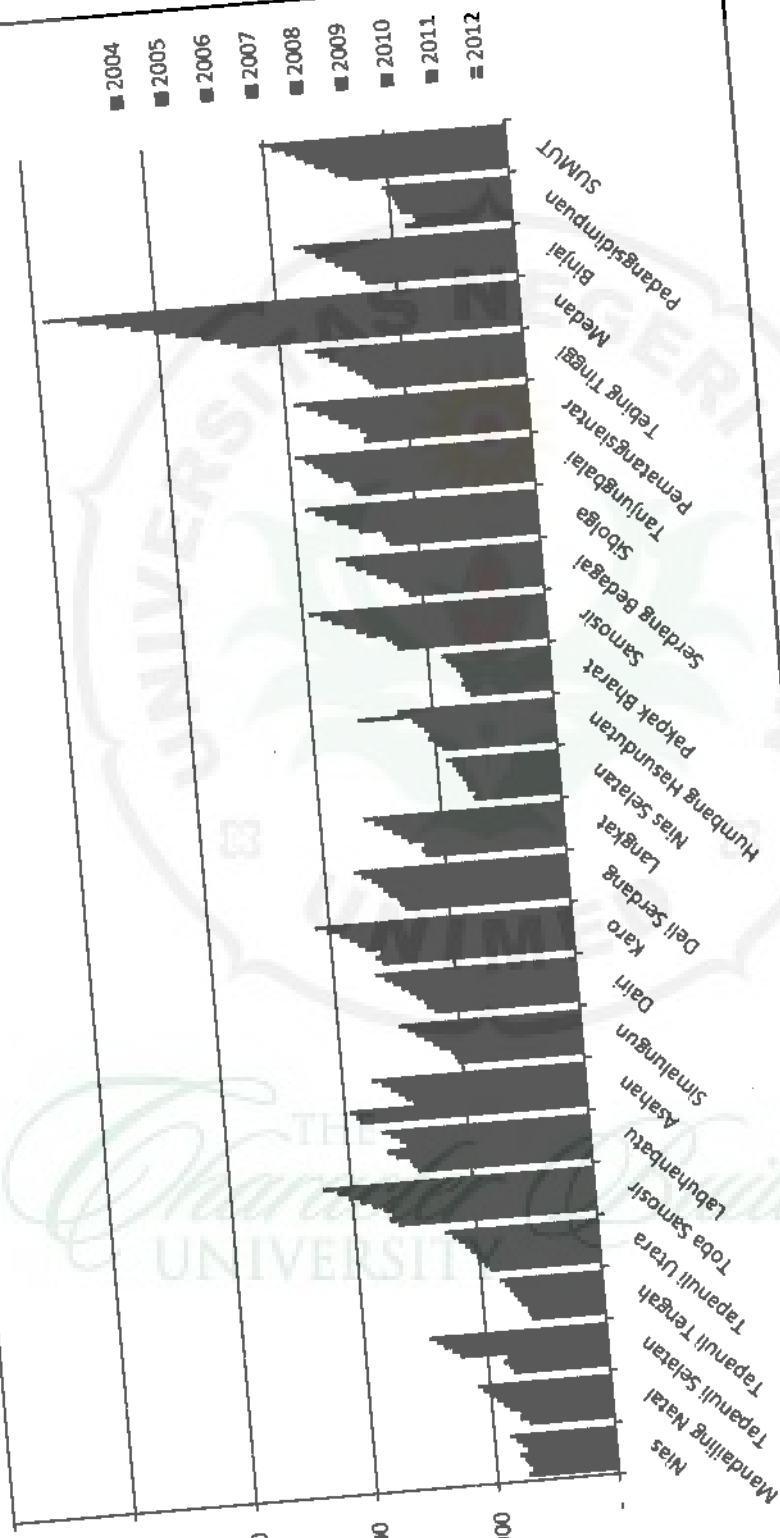
Pada tahun 2004 PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara sebanyak Rp.6.609.292,- tahun 2005 sebanyak Rp.7.130.696,-, tahun 2006 sebanyak Rp.7.383.039,-, tahun 2007 sebanyak Rp.7.926.528,-, tahun 2008 sebanyak Rp.8.344.283,-, jumlah PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2009 sebanyak Rp.8.675.863,-, tahun 2010 sebanyak Rp.9.110.777,-, tahun 2011 sebanyak Rp.9.660.525,-, dan tahun 2012 sebanyak Rp.10.174.791,-, menunjukkan peningkatan PDRB perkapita Sumatera Utara setiap tahunnya (data BPS).

Pada tahun 2012 PDRB perkapita kabupaten/kota tertinggi adalah Kota Medan sebanyak Rp.19.651.288,- diikuti oleh Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Karo masing-masing sebesar Rp.11.190.724,- dan Rp.10.637.029,- di atas PDRB perkapita Sumatera Utara sebesar Rp.10.174.791,-. Sementara PDRB perkapita kabupaten/kota pada tahun 2012 terendah masing-masing adalah

Tabel 1.6. PDRB Perkapita Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Harga Konstan 2000 Periode Tahun 2004 – 2012

NO	PDRB (Rupiah)									
	KABUPATEN/KOTA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Nias	3.717.144	3.524.455	3.688.279	3.784.555	4.015.874	3.648.042	3.887.955	6.114.201	4.362.338
02	Mandailing Natal	3.524.171	3.864.014	3.827.747	4.264.801	4.501.341	4.750.299	5.017.866	5.289.454	5.598.362
03	Tapanuli Selatan	3.967.584	4.124.559	4.346.092	4.364.968	6.190.036	6.407.829	6.761.655	7.054.246	7.372.397
04	Tapanuli Tengah	3.037.506	3.148.611	3.162.049	3.428.497	3.566.834	3.695.410	3.850.969	4.054.842	4.247.764
05	Tapanuli Utara	4.593.627	4.809.865	5.066.911	5.086.126	5.321.241	5.528.232	5.780.955	6.044.495	6.359.204
06	Toba Samosir	8.190.000	8.527.447	8.414.648	8.749.439	9.211.316	9.670.950	10.176.988	10.617.548	11.190.724
07	Labuhanbatu	7.208.710	7.385.989	7.480.311	8.063.616	8.398.676	7.598.298	7.857.113	8.229.694	8.616.226
08	Asahan	9.391.462	9.555.741	9.823.117	7.148.353	7.448.376	7.736.253	8.065.320	8.420.068	8.844.690
09	Simalungun	5.177.504	5.292.447	5.444.628	5.855.951	6.149.590	6.466.547	6.812.974	7.141.787	7.523.192
10	Delit	5.985.671	6.254.208	6.367.513	6.624.871	6.916.246	7.235.739	7.593.589	7.920.146	8.325.390
11	Karo	7.953.427	8.224.137	7.968.385	8.611.984	8.899.765	9.195.334	9.594.214	10.131.858	10.617.729
12	Delit Serdang	6.836.814	7.007.613	7.097.625	7.437.403	7.659.474	7.849.796	8.107.952	8.515.516	8.843.683
13	Langkat	5.790.730	5.898.438	5.809.584	6.447.303	6.750.891	7.068.080	7.452.508	7.809.889	8.249.129
14	Nias Selatan	3.615.511	3.471.119	3.838.639	3.839.400	3.987.320	4.114.542	4.251.105	4.399.593	4.627.730
15	Humbang Hsundutan	4.738.093	4.989.924	5.285.913	5.173.666	5.406.789	5.623.882	5.864.032	6.154.766	6.467.489
16	Pakpak Bharat	3.392.620	3.564.234	3.735.792	3.609.458	3.744.014	3.883.026	4.070.571	4.274.131	4.464.988
17	Samosir	6.232.274	6.394.266	6.647.601	7.439.483	7.864.478	8.323.170	8.846.290	9.287.062	9.784.327
18	Serdang Bedagai	5.356.284	5.746.192	5.927.942	6.403.291	6.798.886	7.206.654	7.663.966	8.039.104	8.463.965
19	Sibolga	6.189.477	6.331.930	6.428.893	7.377.294	7.809.738	8.257.508	8.759.806	9.120.584	9.542.938
20	Tanjungbalai	7.345.543	7.468.769	7.551.912	8.238.366	8.485.109	8.725.979	9.047.279	9.394.860	9.782.307
21	Pematangsiantar	6.874.163	6.795.841	6.989.419	7.440.015	7.838.663	8.231.412	8.687.762	9.125.714	9.644.800
22	Tebing Tinggi	6.248.169	6.460.742	6.691.874	6.965.566	7.300.334	7.646.719	8.024.751	8.481.007	8.981.782
23	Medan	11.748.852	12.411.650	13.174.001	14.243.848	15.129.470	16.023.415	17.077.622	18.220.195	19.651.388
24	Binjai	6.266.053	6.439.516	6.605.547	7.143.796	7.458.695	7.813.795	8.209.884	8.644.670	9.127.004
25	Padaanglampung	4.406.377	3.963.041	4.080.163	4.582.942	4.684.594	4.777.506	4.887.204	5.126.794	5.295.987

Rupiah



Gambar 1.6 PDRB Perkapita Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Harga Konstan 2000 Periode Tahun 2004 sampai dengan 2012

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Pakpak Bharat yang secara berturut-turut sebesar Rp.4.247.764,-, Rp.4.362.338,- dan Rp.4.464.988,- berada di bawah PDRB perkapita Sumatera Utara sebesar Rp.10.174.791,-.

Dengan adanya perbedaan potensi daerah maka pertumbuhan ekonomi antar daerah juga akan berbeda, begitu juga dengan investasi dan pendapatan asli daerah. Di samping itu akan terdapat ketimpangan non ekonomi seperti layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, birokrasi, dan jasa-jasa. Gambaran seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara agar perencanaan pembangunan daerah dapat ditentukan prioritasnya, khususnya dalam era otonomi daerah saat ini dimana pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan agar tercapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti dengan semakin rendahnya ketimpangan pendapatan.

Demikian pula persentase terhadap total jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada tahun 1990 yang lalu perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40% pada tahun 1976 menjadi 22% dari jumlah populasi pada tahun 1984. Suatu penurunan yang cukup besar hanya dalam kurun waktu 8 tahun. Namun setelah krisis 1997 terjadi peningkatan yang tajam, dari 11,34% pada tahun 1996

menjadi 24,20% pada tahun 1998. Pada tahun 1998 sampai tahun 2003 persentasenya kemudian kembali menurun meskipun belum kembali pada kondisi semula (sebelum krisis). Di bawah ini dapat dilihat tabel kependudukan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Pada tahun 2004 Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 12.123.360 jiwa, tahun 2005 sebanyak 12.326.678 jiwa, tahun 2006 sebanyak 12.643.494 jiwa, tahun 2007 sebanyak 12.834.371 jiwa, tahun 2008 sebanyak 13.042.317 jiwa, jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 13.248.386 jiwa, tahun 2010 sebanyak 12.982.204 jiwa, tahun 2011 sebanyak 13.103.596 jiwa, dan tahun 2012 sebanyak 13.215.401 jiwa, menunjukkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, walaupun di tahun 2010 mengalami penurunan (Data BPS).

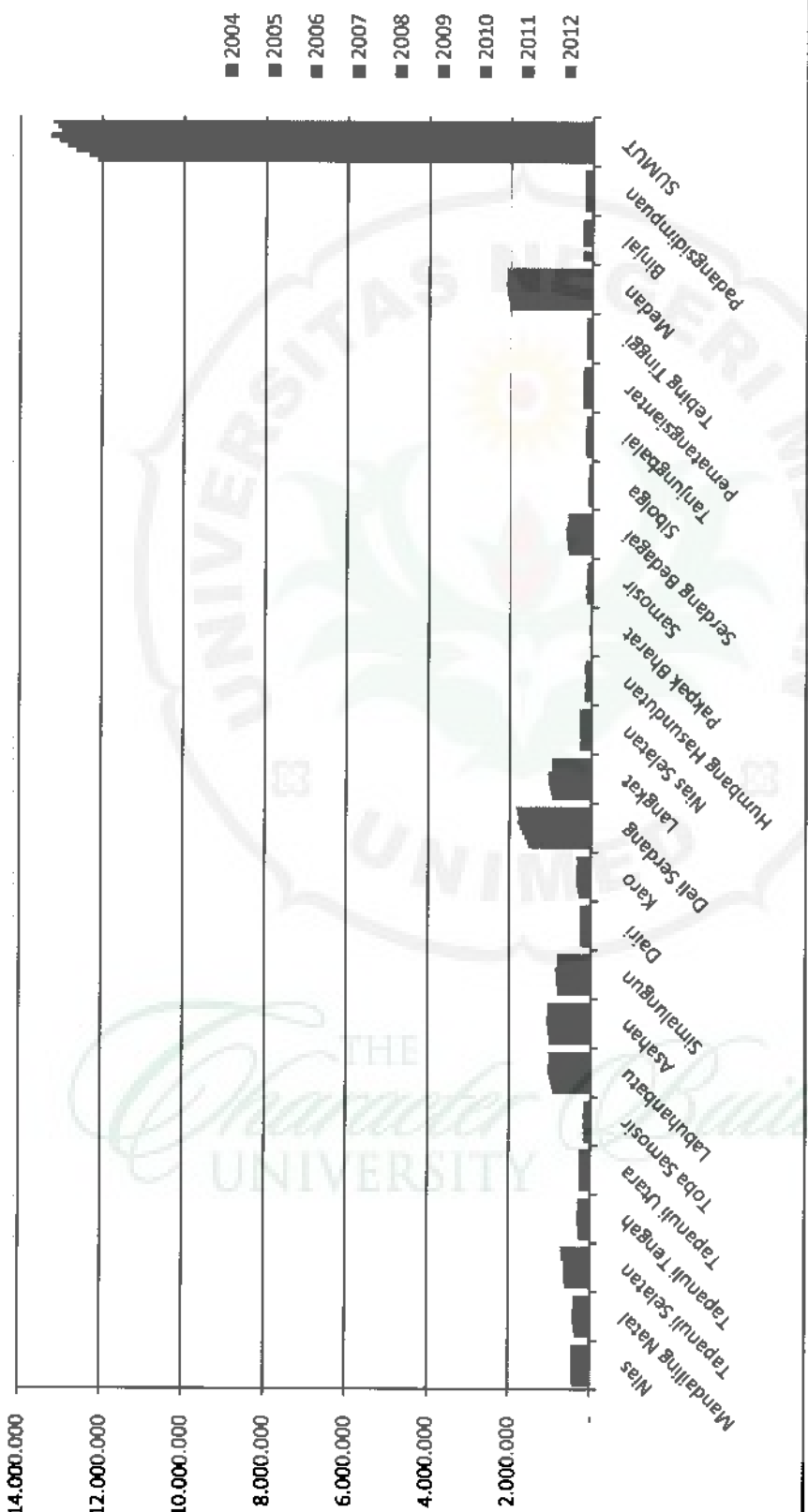
Pada tahun 2012 jumlah penduduk kabupaten/kota tertinggi adalah Kota Medan sebanyak 2.122.804 jiwa diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan masing-masing sebanyak 1.845.615 jiwa dan 1.058.899 jiwa. Sementara jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun 2012 terendah masing-masing adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Sibolga, dan Kabupaten Samsir yang secara berturut-turut sebanyak 41.492 jiwa, 85.852 jiwa dan 121.594 jiwa.

Selain itu, masih banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas garis kemiskinan. Kelompok "nyaris miskin" ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tujuan Bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Perbedaan

**Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Per kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2004 sampai dengan 2012**

NO	Kabupaten/ Kota	JUWA								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Nias	433.350	441.807	442.019	442.548	443.492	444.502	466.630	470.993	472.431
02	Mandailing Natal	379.045	386.150	413.730	417.590	423.712	429.889	404.945	408.731	410.931
03	Tapanuli Selatan	609.922	626.702	629.212	637.312	642.299	647.272	712.605	719.268	729.325
04	Tapanuli Tengah	278.472	283.035	297.843	305.922	314.632	323.563	311.232	314.142	318.908
05	Tapanuli Utara	255.400	256.201	256.444	263.750	267.595	271.474	279.257	281.868	283.871
06	Toba Samosir	167.587	158.677	169.116	169.299	171.833	174.453	173.129	174.748	174.865
07	Labuhanbatu	933.866	951.773	987.157	1.007.185	1.027.964	1.049.766	1.023.484	1.033.054	1.044.912
08	Asahan	1.009.856	1.024.369	1.038.554	1.050.441	1.071.003	1.090.116	1.044.157	1.053.921	1.058.899
09	Simalungun	818.975	826.101	841.199	846.329	853.112	859.879	817.720	825.366	830.986
10	Dairi	259.158	261.287	267.629	268.780	271.983	273.851	270.053	272.578	273.394
11	Karo	312.300	316.207	342.555	351.368	360.880	370.619	350.960	354.242	358.823
12	Oelii Serdang	1.523.881	1.569.638	1.634.115	1.686.366	1.738.431	1.788.351	1.790.431	1.807.173	1.845.615
13	Langkat	955.348	970.433	1.013.819	1.027.414	1.042.523	1.057.768	967.535	976.582	976.885
14	Nias Selatan	282.715	288.233	271.026	271.944	272.848	273.733	289.708	292.417	294.069
15	Humbang Hasundutan	152.519	152.597	152.757	153.837	155.290	158.070	171.650	173.255	174.765
16	Pakpak Bharat	32.260	34.542	34.822	38.726	41.062	42.814	40.505	40.884	41.492
17	Samosir	119.873	131.073	130.662	131.205	131.549	132.023	119.653	120.772	121.554
18	Seraung Bedagal	583.071	588.176	605.630	618.656	630.728	642.983	594.383	599.941	604.026
19	Sibolga	87.260	88.717	91.941	93.207	94.614	96.034	84.481	85.271	85.852
20	Tanjungbalai	149.238	152.814	156.475	159.932	163.679	167.500	154.445	155.889	157.175
21	Pematangsiantar	227.551	230.487	235.372	236.607	238.773	240.939	234.698	236.893	236.947
22	Tebing Tinggi	134.382	135.671	137.959	139.409	141.059	142.717	145.248	146.606	147.771
23	Medan	2.010.676	2.036.185	2.067.288	2.083.156	2.102.105	2.121.053	2.097.610	2.117.224	2.122.804
24	Binjai	232.236	237.904	24.256	248.256	252.652	257.105	246.154	248.456	250.252
25	Padangsidempuan	172.419	177.499	181.865	185.132	188.499	191.912	191.531	193.322	198.800
	Sumatera Utara	12.123.360	12.326.678	12.643.494	12.834.371	13.042.317	13.248.386	12.982.204	13.103.596	13.215.401

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2012 (data diolah)



ambar 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 sampai dengan 2012

tingkat persentase dan jumlah kemiskinan di setiap kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan antar daerah akan semakin besar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian dengan judul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang perlu diteliti adalah:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.
2. Bagaimana klasifikasi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.
3. Bagaimana hubungan antara ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan typologi klasen, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dengan typologi klasen di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan yang lebih rinci dan diharapkan dapat memberikan nilai lebih pada perencanaan program-program

pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rincian tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.
2. Menganalisis klasifikasi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.
3. Menganalisis hubungan antara ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan typologi klasen, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dengan typologi klasen di Provinsi Sumatera Utara periode 2004 sampai dengan 2012.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi terutama dalam upaya mengembangkan pengetahuan tentang ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, typologi klasen, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi ketimpangan antar daerah. Sehingga kebijakan pemerintah dapat

meningkatkan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Memudahkan dan mengarahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih alternatif kebijakan yang akan diambil untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, mengurangi jumlah kabupaten/kota yang terbelakang, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota.
4. Memberikan tambahan referensi dan acuan untuk peneliti berikutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, typologi klasen, dan pertumbuhan ekonomi.